

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan telaahan dan refleksi hasil analisis penelitian sebagaimana yang telah dilakukan serta mengacu kepada tema sentral tentang disparitas etnik Batak dan Melayu dalam Pilkadaesung Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar kedisparitasan etnik Batak dan Melayu dapat dimulai dari aspek *populasi* (penduduk). Penduduk adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan baik dari segi material maupun sosial. Aspek ini menjadi dasar perilaku manusia untuk melakukan persepsi politiknya. Artinya bahwa manusia selalu melakukan aktivitas politiknya berdasarkan perilaku orang banyak yang ada di wilayahnya. Ini terlihat ketika disuatu daerah yang karakteristiknya dominan terhadap etnik tertentu, maka yang menjadi pemenang adalah etnik tersebut.
2. Dalam hal aspek tempat terdapat pola bahwa lokasi/ tempat pemilih berada memiliki persamaan karakteristik hasil pemilihan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ada kecenderungan bahwa di setiap kelurahan memiliki dominasi pasangan menurut tempatnya.
3. Disadari kekuatan etnik ternyata memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi calon pemilih untuk memilih pada pelaksanaan pilkadasung gubernur di Kota Medan. Kekuatan etnik cenderung memberikan pandangan yang subjektif terhadap calon yang secara umum memiliki kemampuan yang

baik. Seperti dapat terlihat dari beberapa hasil wawancara dan partisipan peneliti di lokasi penelitian menunjukkan bahwa hampir 75 % koresponden mengatakan bahwa akan memilih pasangan calon gubernur berdasarkan atas etnik.

4. Aspek dukungan etnik pada etnik Batak dan Melayu memiliki reaksi yang sama terhadap pasangan cagubsu dan cawagubsu pada pilkadasung di Kota Medan. Artinya dukungan etnik merupakan faktor pendukung internal yang terlihat mendasari pilihan terhadap pasangan. Ketika pemilih merupakan etnik Batak, dia lebih cenderung memilih cagubsu dan cawagubsu yang berdasarkan etnik Batak, juga sebaliknya jika pemilih berasal dari etnik Melayu akan memilih cagubsu dan cawagubsu yang berasal dari etnik Melayu.

5. Hal lain adalah dalam bentuk sosialisasi di lapangan, terlihat perbedaan terhadap sesama etnik Batak bahwa pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu lebih dominan jika dibandingkan dengan pasangan RE. Siahaan-Suherdi. Hal ini dapat terlihat banyaknya spanduk bernuansa etnik yang terpasang jika dibanding dengan pasangan RE. Siahaan dan Suherdi.

6. Sosialisasi spanduk juga terlihat antara etnik Batak dan etnik Melayu, adalah kecenderungannya bahwa sosialisasi etnik Batak lebih banyak dalam hal mendukung TRIBEN dan etnik Melayu dukungan terhadap pasangan cagubsu Melayu tidak ada.

7. Kekuatan spanduk untuk menjaring pemilih untuk memilih pasangannya ternyata tidak memiliki kontribusi yang pasti dalam mendukung pasangan berdasarkan harapan yang ada pada spanduk tersebut.

Melayu. Spanduk yang bertekanan Punguan Marga "X" banyak terpasang di Kota Medan, sementara etnik lainnya seperti Melayu tidak memiliki spanduk.

Ternyata memang apa yang difahami bahwa sikap politik etnik Batak bersifat egaliter dibanding dengan etnik lainnya yang masih bersifat kooperatif.

Dengan terbuktinya secara empiris bahwa terdapat disparitas etnik Batak dan Melayu pada pemilihan langsung Sumatera Utara di Kota Medan, berimplikasi bahwa proses pemilihan yang dilakukan penduduk memiliki dampak terhadap suku dan penduduk yang mendasari pasangan yang akan dipilih.

Temuan penelitian ini juga berimplikasi bahwa jika para elite politik berminat mensukseskan proses pemilihan apapun, baik pada level Bupati/Walikota, maupun Presiden haruslah dapat mengadakan pendekatan terhadap etnik tersebut dan mencoba memahami konsep budaya dari masing-masing etnik

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi penelitian di atas, maka disarankan kepada :

1. Para Politisi, hendaknya tetap berusaha melakukan pendekatan-pendekatan terhadap etnik secara berkesinambungan dan jangan hanya dilakukan pada saat mau dilaksanakannya proses pemilihan.
2. KPUD Sumatera Utara hendaknya bekerja lebih profesional dalam mencegah lebih banyaknya penduduk yang tidak melaksanakan haknya sebagai peserta pemilih (golongan putih).

3. Para Partai Politik, hendaknya dapat menerapkan program yang dapat menyentuh hati nurani rakyat dan program hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan.

4. Para pejabat pemerintahan, hendaknya memiliki konsep pembangunan yang berhubungan dengan kehidupan semua etnik, sehingga tidak dianggap hanya mementingkan etnik tertentu.

5. Para masyarakat, hendaknya dapat dijadikan sebuah reflektif terhadap kemampuan masing-masing etnik dapat berpengaruh dan menjadi kekuatan untuk kelangsungan pembangunan ini.

